

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia masih giat-giatnya melakukan pembangunan disegala aspek kehidupan masyarakat untuk mengupayakan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata material, dan spritual serta sejahtera disegala bidang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata, material dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 didalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka berdaulat, bersatu dan berdasarkan rakyat merakyat dalam suasana perilaku kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan damai.

Dari uraian di atas diketahui bahwa Indonesia secara bertahap dan berkesinambungan membangun suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, merata, material dan sprituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di segala sektor atas perencanaan yang matang. Perencanaan pembangunan nasional hanya dapat terwujud bila terciptanya suatu hubungan kerjasama yang harmonis dan selaras antara pemerintah dengan partisipasi seluruh rakyat Indonesia.

Terciptanya partisipasi masyarakat sebagai modal penting dalam pembangunan, maka pemerintah perlu sekali meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pentingnya partisipasi masyarkat dalam pembangunan ditegaskan oleh

Sondang P. Siagian yang menyatakan :

Dengan perkataan lain partisipasi dari masyarakat luas pun mutlak diperlukan, oleh karena mereka itulah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang telah dipikirkan oleh *political elite*, direncanakan serta dirumuskan dalam bentuk program kerja dan administratif elite didukung oleh cendekiawan, usahawan, pihak militer, serta dibarengi oleh informal observes. Rakyat banyak memegang peranan sekaligus subjek dan objek pembangunan nasional.¹

Defenisi diatas memperlihatkan betapa pentingnya peranan rakyat untuk ikut mensukseskan program-program pembangunan Indonesia yang telah direncanakan dan telah ditetapkan, sehingga pemerintah benar-benar memperhatikan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan sosial (khususnya kesehatan), sesuai dengan nilai-nilai harkat derajat dan martabat manusia.

Salah satu keputusan penting yang diambil oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat menyangkut program pembangunan nasional dibidang kesehatan adalah dengan lahirnya instruksi bersama antara Mendagri, Menkes dan kepala BKKBN pada tahun 1985 nomor 23 (214/ menkes / ins.B/B/1985: 112/HK.011/A. 1985) tentang penyelenggaraan imunisasi di puskesmas melalui program posyandu.

Adapun pengertian pelaksanaan imunisasi di puskesmas melalui program posyandu itu adalah: merupakan kegiatan oleh dan untuk masyarakat, akan menimbulkan komitmen masyarakat, terutama bagi ibu, dalam menjaga kelestarian hidup serta tumbuh kembang anak, dengan alih teknologi dari pemerintah.

¹ Sondang P. Siagian, *Administratif Pembangunan*, Gunung Agung. Jakarta, 2001, hal 30.